



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TADULAKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. RUSYDI H
2. Jabatan : KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. NHK : 431706

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.108.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 536.000.000
2. Tanah Seluas 283 m2 di KAB / KOTA MAMUJU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 42.450.000
3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 492 m2/492 m2 di KAB / KOTA MAMUJU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/332 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 490.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.547.542

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.651.997.542



III. HUTANG

Rp. 699.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 952.997.542

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.